

ABSTRAK

Alat kontrasepsi merupakan sarana untuk mengatur, membatasi, atau menghentikan kehamilan. Secara hukum, penggunaannya telah menjadi bagian dari upaya kesehatan reproduksi anak usia sekolah dan remaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). PP Kesehatan mengatur penyediaan alat kontrasepsi kepada anak, namun tidak mencantumkan aspek promosinya. Sebaliknya, Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) melarang promosi alat kontrasepsi kepada anak, tetapi tidak mengatur sanksi atas penyediaannya. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji apakah norma dalam Pasal 408 KUHP Nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta implikasi yuridis yang dapat timbul dari adanya perbedaan pengaturan terkait penyediaan dan promosi alat kontrasepsi kepada anak tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum berupa bahan hukum primer yakni KUHP Nasional dan PP Kesehatan, serta bahan hukum sekunder yakni buku teks, artikel jurnal, dan literatur lain yang relevan. Keseluruhan bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan ditarik kesimpulannya secara deduktif.

Penelitian ini menggunakan teori *Stufenbau* oleh Hans Kelsen untuk menganalisis kontradiksi antara norma hukum yang ada, serta teori normatif-dogmatik tentang kepastian hukum untuk mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari pertentangan norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Pasal 408 KUHP Nasional bertentangan dengan PP Kesehatan. *Kedua*, terdapat implikasi yuridis yang timbul dari pertentangan tersebut berupa ketidakpastian hukum, baik bagi anak, maupun bagi pihak berwenang di bidang kesehatan yang menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Kontradiksi dan Kekaburan Norma; Penyediaan dan Promosi Alat Kontrasepsi; Anak.

ABSTRACT

Contraceptives are tools used to manage, limit, or terminate pregnancy. Legally, contraceptive usage has become part of reproductive health programs for school-age children and adolescents, as stipulated in Article 103 of Government Regulation Number 28 of 2024 on Implementation regulations of Law Number 17 of 2023 on Health (Government Regulation on Health). The Government Regulation on Health regulates the provision of contraceptives to children, but does not include the promotion aspect. In contrast, Article 408 of Law Number 1 of 2023 on Criminal Code (National Criminal Code) prohibits the promotion of contraceptives to children, but does not regulate sanctions for their provision. Therefore, this research aims to examine whether the norms in Article 408 of the National Criminal Code contradict other relevant regulations, as well as the legal implications that may arise from the different arrangements related to the provision and promotion of contraceptives to children.

This type of research is normative legal research, using a statutory approach and concept approach. The legal materials consist of primary legal sources, namely the National Criminal Code and the Government Regulation on Health, as well as secondary legal sources such as textbooks, journal articles, and other relevant literature. The entire legal material is analyzed in a descriptive qualitative way, and the conclusion is drawn deductively.

This research uses Hans Kelsen's Stufenbau theory to analyze the contradictions between existing legal norms, and the normative-dogmatic theory of legal certainty to examine the legal implications arising from the norm contradiction. The results of the research show that, first, Article 408 of the National Criminal Code contradicts the Government Regulation on Health. Second, there are legal implications arising from the conflict in the form of legal uncertainty, both for the child, as well as for the health authorities who carry out their duties.

Keywords: *Contradiction and Vagueness of Norms; Provision and Promotion of Contraceptives; Children.*